

Siaran Pers

## **PEMBIAYAAN ALTERNATIF PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI MEKANISME KPBU DAN PINA**

**JAKARTA** – Kementerian PPN/Bappenas pada siang ini, Jumat (17/2), menyelenggarakan acara **Talkshow Pembiayaan Alternatif Penyediaan Infrastruktur**. *Talkshow* tersebut menghadirkan pembicara dari unsur pemerintah, badan usaha pelaksana infrastruktur dan Investor. Hadir dalam acara ini adalah perwakilan dari kedutaan-kedutaan besar, lembaga internasional, dunia usaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas untuk pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pencarian sumber-sumber pembiayaan non anggaran pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di mana pemerintah perlu mendorong pembangunan infrastruktur melalui alternatif pembiayaan lainnya. Melalui acara ini, diharapkan lahir paradigma baru mengenai alternatif-alternatif pembiayaan inovatif untuk penyediaan infrastruktur di Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam *talkshow* ini, diperkenalkan pembiayaan alternatif penyediaan infrastruktur melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Skema PINA ini akan melengkapi skema KPBU yang juga dikenal dengan nama *Public Private Partnership* (PPP). Salah satu contoh fasilitasi pemerintah yang telah sukses adalah tercapainya *financial closing* untuk pembiayaan ekuitas proyek jalan tol Waskita Toll Road yang melibatkan peran PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero). Proyek tersebut diharapkan dapat mewujudkan terkoneksinya kota-kota di Pulau Jawa pada 2018. Kesuksesan ini dapat menjadi motor penggerak dan studi kasus suksesnya skema PINA dalam pembiayaan infrastruktur yang diharapkan dapat ditiru oleh proyek-proyek infrastruktur dan non infrastruktur lainnya. Kementerian PPN/Bappenas yang telah mendapat mandat oleh Presiden Republik Indonesia, telah siap untuk melakukan fasilitasi PINA

Bersamaan dengan *talkshow* ini, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan PPP Book 2017 yang berisi 22 (dua puluh dua) proyek dengan skema KPBU. PPP Book 2017 disusun dengan lebih matang dan komprehensif dan diharapkan mampu menarik minat potensial investor untuk terlibat dalam proyek-proyek KPBU yang terdapat di berbagai sektor meliputi infrastruktur ekonomi maupun sosial. Lokasi-lokasi proyek juga tersebar dari Medan, Batam, Pekanbaru, Lampung, Jawa, Manado hingga Papua. “Melalui kedua skema alternatif pembiayaan infrastruktur yaitu PINA dan KPBU, pemerintah akan terus berusaha mendorong partisipasi swasta dan lembaga pengelola keuangan untuk terlibat dan berkontribusi dalam upaya penyediaan infrastruktur,” tutup Menteri Bambang.

Jakarta, 17 Februari 2017

Thohir Afandi  
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Biro Hubungan Masyarakat dan TU Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310  
Telepon: (021) 31936207, 3905650  
Faksimile: (021) 3145374  
E-mail: [humas@bappenas.go.id](mailto:humas@bappenas.go.id)